



PENYUSUNAN ANNUAL WORK PLAN (AWP) DINAS PU PROVINSI, DINAS PU KABUPATEN, DAN BAPPEDA KABUPATEN PADA KEGIATAN IPDMIP TA.2021

JAKARTA, 1 OKTOBER 2020

INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
NPIU OP

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN





KOMPONEN KEGIATAN IPDMIP NPIU OP

Kegiatan Terkait <i>Disbursement Link Indicator (DLI)</i>	DLI	Target DLI 2018-2021	Pelaksana
	DLI 1-Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	<ul style="list-style-type: none">•Baseline IKSI untuk 1,7 Juta ha Daerah Irigasi•Peningkatan nilai IKSI sebanyak 10% pada tahun 2020•Peningkatan nilai IKSI sebanyak 15% pada 2021	NPIU OP dan Satker OP B/BWS
	DLI 2-Pedoman Teknis	<ul style="list-style-type: none">•Penyusunan pedoman Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)•Penyusunan Pedoman Pemberdayaan P3A•Penyusunan Pedoman PAKSI	NPIU OP
	DLI 4-Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	<ul style="list-style-type: none">•74 Dokumen RP2I disahkan oleh Bupati	B/BWS, Dinas PU Prov, Dinas PU Kab, dan Bappeda Kab
	DLI 5-Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	<ul style="list-style-type: none">•Update SI-PAI•Update data PAI untuk 2,5 juta ha Daerah Irigasi	NPIU OP dan Satker OP B/BWS
	DLI 6-Pemberdayaan P3A	<ul style="list-style-type: none">•4.500 unit P3A beroperasi efektif	Dinas PU Kab



KEGIATAN-KEGIATAN DINAS PU PROVINSI, DINAS PU KABUPATEN, DAN BAPPEDA KABUPATEN



DINAS PU KABUPATEN:

1. Pengisian Data RP2I
2. Pembentukan P3A/GP3A/IP3A
3. Pelatihan P3A/GP3A/IP3A
4. Studi Banding P3A ke Kabupaten yang Berhasil
5. Rencana Penyesuaian Struktur P3A, AD/ART, dan Badan Hukum
6. Review P3A/GP3A/IP3A
7. Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum, pemilihan pengurus

DINAS PU PROVINSI:

1. Pengisian data RP2I

BAPPEDA KABUPATEN:

1. Pembentukan Tim Penyusun RP2I
2. Pengesahan Rencana 5 (lima) tahunan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)



KEGIATAN-KEGIATAN PRIORITAS PADA TA.2021



DINAS PU PROVINSI

- Pengisian data RP2I

DINAS PU KABUPATEN

- Pengisian data RP2I
- Rencana Penyesuaian Struktur P3A, AD/ART, dan Badan Hukum
- Review P3A/GP3A/IP3A
- Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum, pemilihan pengurus

Bappeda Kabupaten

- Pembentukan Tim Penyusun RP2I
- Pengesahan Rencana 5 (lima) tahunan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)

Pemenuhan
Capaian DLI



HAL-HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN



1. Dinas PU Kabupaten dan Dinas PU Provinsi melakukan kegiatan pengisian data/penyusunan RP2I paling lambat pada TA.2021,
2. Bappeda Kabupaten memastikan kegiatan Pembentukan Tim dan Pengesahan RP2I ada di dalam AWP dan DPA TA.2021, karena kegiatan ini simultan dengan kegiatan penyusunan RP2I di B/BWS, Dinas PU Provinsi, dan Dinas PU Kabupaten;
3. Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian, dan Balai diharapkan dapat berkoordinasi untuk menyusun dokumen RP2I, dibantu oleh konsultan pendukung Balai dan konsultan ISAI Bangda
4. NPIU OP akan melakukan pendampingan finalisasi penyusunan RP2I, Balai dan Dinas akan dikelompokkan sesuai dengan wilayah administrasinya
5. Dinas PU Kabupaten melaporkan data P3A/GP3A/IP3A yang dibentuk dan direvitalisasi melalui program IPDMIP
6. Konsultan pendamping Balai dan TPM melakukan pendampingan pengisian form verifikasi DLI 6 beserta data-data pendukungnya kepada Dinas PU Kabupaten

Sebelum melakukan Asistensi, Dinas PU dan Bappeda agar dapat menyampaikan data-data sebagai berikut:

1. OWP Updated terakhir
2. Data AKNOP TA.2020 (atau DPA untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi)
3. Progress Kegiatan OP TA. 2020
4. Updating Data P3A/GP3A/IP3A



PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Proses revisi Anggaran: a. Pagu DPA tidak sesuai AWP dan kebutuhan	a. Menyesuaikan pagu anggaran dengan AWP dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan
2.	Kurangnya koordinasi antar instansi peserta IPDMIP, sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana dengan baik, contoh: Dinas PU Kab sudah menganggarkan penyusunan RP2I, namun Balai dan Dinas PU Provinsi belum menganggarkan, padahal output dokumen RP2I adalah gabungan dari penyusunan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten	Balai, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan Bappeda agar melakukan sinronisasi kegiatan terlebih dahulu, sebelum penyusunan AWP 2021





TERIMAKASIH
